

SKRIPSI
DINAMIKA POLITIK PENJABAT (PJ) WALIKOTA MAKASSAR TAHUN
2020

Disusun dan Diajukan oleh

WIDYA ASTUTI

E 111 16 009



DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**DINAMIKA POLITIK PENJABAT (PJ) WALIKOTA MAKASSAR
TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan oleh:

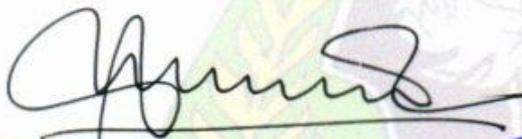
WIDYA ASTUTI

(E111 16 009)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 196511091991031008

Pembimbing Pendamping



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990031023

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP.196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI**

Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020

Disusun dan di ajukan oleh:

Widya Astuti

E111 16 009

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitian ujian skripsi

Pada program studi Ilmu Politik

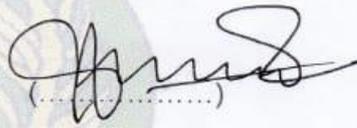
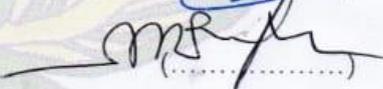
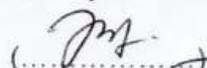
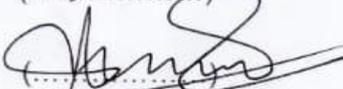
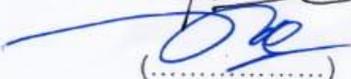
Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada 15 Juli 2021

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua	: Prof. Dr. Armin Asryad, M.Si	
- Sekertaris	: Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D	
Anggota	: Andi Naharuddin, S.IP., M.Si	
Anggota	: Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP	
Pembimbing 1	: Prof. Dr. Armin Asryad, M.Si	
- Pembimbing 2	: Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D	

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Widya Astuti
NIM : E11116009
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020"
adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan
tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil
karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa
sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2021

Yang menyatakan



Widya Astuti

ABSTRAK

Widya Astuti. NIM E111 16 009. Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020 Di bawah bimbingan **Prof. Dr. Armin, M.Si. Dan Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD**

Pada Tahun 2018, Indonesia melaksanakan pemilu serentak khususnya Kota Makassar yang melaksanakan pemilihan walikota. Namun saat itu Kota Makassar hanya memunculkan satu pasangan tunggal saja sehingga menurut UUD, pemilihan walikota Makassar harus melawan kotak kosong. Dan dimenangkannya kotak kosong, kota Makassar harus dipimpin oleh Penjabat (Pj) hingga adanya kepala daerah definitif. Dengan adanya Penjabat (Pj) ini memunculkan dinamika politik terhadap proses pengangkatan maupun pergantiannya. Pergantian Pj yang dilakukan sebanyak tiga kali membuktikan bahwa memang ada dinamika politik yang bermain didalamnya. Terkhusus dengan adanya Pj yang hanya menjabat selama 43 hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terpilihnya dan faktor-faktor tergantikannya Prof Yusran Yusuf sebagai Pj Walikota Makassar pada tahun 2020. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan bagaimana proses terpilihnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga Prof Yusran Yusuf diganti menjadi Pj Walikota serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti data-data dari instansi terkait. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan ialah pendekatan new institusionalisme, teori kekuasaan dan teori kepemimpinan.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik dalam proses pengusulan maupun proses tergantikannya Prof Yusran Yusuf terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Dan karena tidak adanya norma atau aturan yang mengatur maka pergantian Pj walikota terdapat beberapa kali pergantian dalam satu periodisasi hingga adanya kepala daerah definitif.

Kata kunci : Penjabat (Pj) Walikota, Pergantian Pj, Dinamika Politik

ABSTRACT

Widya Astuti. NIM E111 16 009. Political Dynamics of the Interim Mayor of Makassar in 2020. Under the guidance of *Prof. Dr. Armin, M.Sc.* and *Drs. H. A. Yakub, M.Sc, P.hD*

In the year of 2018, Indonesia held simultaneous elections, especially Makassar City which held the mayoral election. However, at that time the City of Makassar only gave rise to one single pair so that according to the Constitution, the election of the mayor of Makassar must be against an empty box. And when the empty box is won, the city of Makassar must be led by an Interim Mayor until there is a definitive regional head. The existence of this Interim Mayor raises the political dynamics of the process of appointment and replacement. The replacement of the Interim Mayor which was carried out three times proved that there were indeed political dynamics at play in it. Especially with the Interim Mayor who only served for 43 days.

This study aims to find out how the process of selecting and replacing Prof. Yusran Yusuf as Interim Mayor of Makassar in 2020. The author also conducts case study research on the basis of qualitative research. Data collection was carried out by interviewing key informants who were considered able to explain how the election process was and what factors influenced it so that Prof Yusran Yusuf was replaced as Interim Mayor and completed it with several written references such as data from related agencies. The approaches and theories used are the new institutionalism approach, the theory of power and the theory of leadership.

The results of this study explain that both in the nomination process and in the process of replacing Prof. Yusran Yusuf, there are several factors that influence and cannot be separated from political interests. And because there are no norms or rules that regulate the replacement of the

Acting Mayor, there are several changes in one period until there is a definitive regional head.

Keywords : Interim Mayor, The replacement of the Interim Mayor, Political Dynamics.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilalamin Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020”** salam dan shalawat juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini namun berkat segala bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang menemani perjalanan penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka pada kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Tajuddin dan Ibu Rusnawati yang telah melahirkan, membesarkan

dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada mami dan daddy yang tak hentinya mendoakan dan memberikan semangat meskipun jauh dalam jangkauan namun kasih sayangnya selalu terasa. Kepada Acca, Male, Ayah, Ibu, Mama Anti, Bapak Rijal, Salsabila Aisyah saudari satu-satunya yang penulis sayangi. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tiada hentinya memberikan semangat, perhatian, motivasi dan doa.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Dr. H. A. Yakub, M.Si, P.hD selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin

2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak **Dr. Suparman Abdullah, M.Si**, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Perencanaan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak **Dr. Hasrullah, M.Si**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muh, Kausar Bailusy, MA (Alm)**, **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, **Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**,

Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Kakak Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

8. Seluruh pegawai dan staf fakultas khususnya Ibu **Ija**, Ibu **Muli** dan pak **Ancu** serta staf dan pegawai departemen ilmu politik khususnya Bapak Aditya, Bapak Hamzah, dan Ibu Hasna, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
9. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi rumah dan tempat belajar penulis sehingga bisa seperti sekarang ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan **Himapol FISIP Unhas** periode 2018-2019 yang sangat memberikan dukungan tenaga dan pikiran. Terima kasih, kalian luar biasa.

11. Kepada teman-teman struktural **BEM Kema FISIP Unhas Periode 2020**. Terima kasih atas ruangnya sehingga penulis dapat belajar banyak tentang administrasi.
12. Kepada senior-senior yang tiada henti mengarahkan ketika penulis kehilangan arah baik dalam dunia kelembagaan maupun dunia akademik. **Kak Fikri, Kak Naje, Kak Galang, Kak Mukmin, Kak Yayat, Kak Ichwan, Kak Rifan, Kak Siska, Kak Syarif, Kak Ghiffar** dan semuanya yang tiada henti berkontribusi.
13. Kepada junior-junior tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan membantu semua urusan yang kadang kala tidak bisa penulis selesaikan sendiri, Adikku tercinta **Mar'ah, Adik-adik Dekrit17, Revolusi18, Diplomasi19 dan Dinamis20**.
14. Kepada teman-teman dilembaga kemahasiswaan, keluarga besar **Kema FISIP Unhas, UKM VBC FISIP Unhas** dan teman-teman **Himapol Indonesia**.
15. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 16** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
16. Kepada saudara saudariku Reformasi16, **Agung, Gazali, Iwan, Marie, Wawan, Riswan, Bias, Anwar, Tommi, Alfa, Nurul, Caca, Eki, Mul, Apri, Anggun, Salwah, Indah,**

Wide, Fida, Arin, Tenri, Wanda, Ira, Risma, Gusti, yang selalu keep in touch dalam dunia perkuliahan ini

17. Kepada teman-teman **KKN Tematik Pulau Sebatik gelombang 102** yang keluarganya masih hangat sampai saat ini.

18. Kepada teman-teman **Posko Sei Limau** dan **Nagh-nagh pepsil** yang telah banyak meluangkan waktu untuk selalu menghibur penulis dikala penat dalam urusan skripsi

19. Kepada saudara-sudari terbaik sepanjang perkuliahan **Nurul, Caca, Niaw, Sasti, Miran, Dirvan, Jery, Dadang, Abi dan Dede** yang banyak memberikan pengalaman tentang dunia mahasiswa yang sesungguhnya.

20. Kepada Teman-teman lingkaran setan saudara **Panji, Faiz, Jackson dan kak Nazar** yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk direpotkan dan selalu menyajikan bahan untuk tertawa bersama.

21. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang sangat membantu dalam memfasilitasi segala data yang berkaitan dengan penelitian ini, **Anif, Ikhsan, dan Panji**.

22. Kepada teman-teman Himapol UIN Connection yang selalu bersedia menerima ajakan “adakah” dari penulis terkhusus

kepada **Kak Heril, Kak Mashardi, Kak Awi Ikhsan, Yayat, Inces dan Tenri.**

23. Kepada **Pakcik, Makcik, dan Bang Nur Yang** telah menjadi tuan rumah yang baik selama di Sebatik.

24. Kepada **Blackpink** yang menyuguhkan lagu-lagu pembangkit semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tenang tiap kali mendengar lagu-lagunya.

25. Kepada **Sosok Lelaki Terbaikku** yang tiada henti menemani segala proses dan selalu menyalurkan kasih sayang dan cintanya lewat bantuan, doa serta semangat. Terima kasih untuk apapun itu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.2. Teori Kekuasaan	15
2.2.1. Dimensi- Dimensi Kekuasaan.....	18
2.3. Teori Kepemimpinan	20
2.4. Dinamika Politik.....	22
2.5. Telaah Pustaka	23
2.6. Kerangka Pemikiran	26
2.7. Skema Berfikir	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian	30
3.3. Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)	32
3.4.2 Arsip / Dokumen	33
BAB IV	36
GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN	36
4.1 Sejarah Kota Makassar	36

4.2 Letak Geografis	44
4.3 Latar Belakang Munculnya Penjabat (PJ) Walikota Makassar	46
BAB V	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Proses Terpilihnya Prof Yusran Yusuf Sebagai Pj Walikota Makassar	49
5.1.1 Usulan Gubernur	49
5.1.2 Keputusan Menteri Dalam Negeri	53
5.1.3 Pelantikan Oleh Gubernur	55
5.2 Faktor Penyebab Prof. Yusran Yusuf Diganti Sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020	57
5.2.1 Faktor Normatif	58
5.2.2 Faktor Psikologi	61
5.2.3 Faktor Politik	66
BAB VI	73
PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Penelitian.....	28
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Nama-nama Informan.....	33
Tabel 4.1. Jumlah Kecamatan di Kota Makassar	44
Tabel.4.2. Daftar Nama Penjabat Walikota Makassar periode 2019-2020.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah, yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau walikota (kepala daerah kota). Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.¹

¹Pengertian Pilkada, <https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html>. Pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 21:01

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten
3. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota

Kota Makassar adalah salah satu daerah melaksanakan pilkada pada tahun 2020 yaitu pemilihan Walikota. Makassar juga salah satu daerah yang sangat kental mengenai dinamika politiknya. Baik dari segi etnik maupun elitnya. Salah satu peristiwa besar yang sangat mencuri perhatian publik adalah fenomena pemilihan walikota Kota Makassar pada tahun 2018 yang lalu. Pasalnya, pemilihan ini hanya melahirkan satu pasangan calon saja atau biasa disebut dengan calon tunggal. UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebut bahwa pelaksanaan pilkada hanya dapat berjalan minimal adanya dua pasangan calon dibatalkan dengan adanya putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan MK ini menjelaskan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung meski terdapat satu pasangan saja.

Implementasi dari Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah munculnya calon tunggal di beberapa daerah pada pemilihan umum tahun 2018 salah satunya adalah kota Makassar. Munculnya kolom kosong di Makassar setelah Mahkamah Agung (MA) mencoret pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAMI) dari bursa Pilwalkot Makassar karena dianggap melakukan pelanggaran dalam proses kampanye dengan membagikan sejumlah ponsel kepada masyarakat. Atas putusan itu, Pemilihan Walikota Makassar akhirnya diikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). MA dalam putusannya beranggapan bahwa Danny Pomanto selaku petahana dianggap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam program pemerintahannya.²

Dimenangkannya kolom kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota Makassar, maka kota Makassar terhitung sejak masa jabatan walikota telah selesai hingga tahun 2021, dipimpin oleh pj (penjabat) Walikota. Pengangkatan Pj walikota ini adalah kewenangan dari Kemendagri (Kementerian dalam Negeri) melalui pemerintah Provinsi dalam hal ini gubernur. Kursi Walikota Makassar selanjutnya akan diisi oleh seorang penjabat (Pj) walikota jika kolom kosong yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Hal itu tertuang secara gamblang dalam Pasal 54D Ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016.

² Amelia, Ananda Rizki. 2020. *"Mobilisasi Dukungan Pada Pilkada Serentak 2018: Perbandingan Kemenangan Dan Kekalahan Kolom Kosong Di Kota Makassar Dan Kota Tangerang"*. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang. Hal 7

Penjabat (Pj) adalah seorang yang diberi kewenangan untuk sementara menduduki suatu jabatan dimana jabatan tersebut tidak diduduki oleh seorang pun dengan kata lain kosong. Penjabat kepala daerah ditingkat Kota dalam hal ini PJ Walikota kemudian akan ditetapkan oleh Kemendagri melalui usulan Gubernur, walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif. Mengenai pelaksana tugas sementara dalam hal ini disebut sebagai penjabat telah diatur dalam pasal 86 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 7 Permendagri No. 1 tahun 2018 menyatakan bahwa penjabat sementara gubernur, bupati, dan walikota, ditetapkan dengan Surat keputusan Menteri.

Legalitas penunjukan Penjabat Walikota juga harus dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti menurut Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa prinsip legalitas dalam tindakan/keputusan pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas *praesumptio iustae causa/vermoeden van rechtmatig/keabsahan* tindakan pemerintah, yang artinya setiap perubahan, atau keputusan suatu pejabat yang berwenang selalu dianggap sah kecuali apabila telah

adanya putusan pembatalan yang inkraht dari pengadilan yang berwenang. Sedangkan substansi akan melahirkan legalitas materiiil.³

Sebagai pejabat walikota walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif. kewenangan Pejabat yang terpilih yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

1) Pjs Gubernur, Pjs Bupati, dan Pjs Walikota mempunyai tugas dan wewenang:

a) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;

d) melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

³ Jurnal Sofyan Hadi & Tomy Michae, 2017, Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (Jurnal Cita Hukum Vol.5 No. 2), Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta, hal. 389

e) melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs walikota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Plt atau Pjs kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat pada pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

(1) Hal hal yang dilarang:

a) melakukan mutasi pegawai;

b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Terhitung sejak masa jabatan Moh. Ramdhan Pomanto berakhir, kota Makassar dipimpin oleh Pj (Penjabat) Walikota. Iqbal Suhaeb merupakan tokoh yang berhasil menduduki jabatan Penjabat (Pj) walikota Makassar. Pelantikan Iqbal Suhaeb sebagai orang nomor satu di Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor: 131. 73 - 2352 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 April 2019 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban walikota sampai satu tahun kedepan terkecuali dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri atau pengadilan yang berwenang.

Iqbal Suhaeb mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai penjabat walikota Makassar setelah gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menunjuk Prof. Yusran Yusuf sebagai penggantinya. Keputusan pengangkatan Prof Yusran sebagai penjabat Walikota Makassar dituangkan melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bernomor 131. 73 - 779 Tahun 2020.⁴

⁴Gubernur Sulsel Lantik Yusran sebagai Penjabat Wali Kota Makassar. <https://daerah.sindonews.com/read/28066/174/gubernur-sulsel-lantik-yusran-sebagai-penjabat-wali-kota-makassar-1589425508>. Pada tanggal 5 Februari 2021 21:49

Masa jabatan Prof Yusran sebagai Pj walikota Makassar dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid 19. Kasus covid 19 menjadi prioritas utama di dunia khususnya Indonesia. Terlebih lagi pada kepala daerah yang baru terpilih karena dapat menjadi evaluasi kinerja secara khusus. Begitupun dengan posisi Prof. Yusran yang menggantikan posisi Iqbal Suhaeb sebagai Pj walikota ditengah-tengah pandemi. Masa jabatan Prof Yusran sebagai Pj walikota hanya berlangsung selama 43 hari. Bisa dikatakan bahwa Prof Yusran adalah satu-satunya pejabat yang menjabat sebagai Pj dengan masa jabatan yang sangat singkat. Alasan Prof Nurdin selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengganti Prof Yusran adalah karena dianggap tidak mampu menekan skala covid yang semakin meningkat. Menurutnya, di masa pandemik covid dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk bersatu padu guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Kondisi pandemi yang terjadi di tanah air menjadi tantangan bagi setiap kepala daerah secara khusus untuk menjalankan tugasnya. Tidak terkecuali dengan Prof Yusran sebagai Pj Walikota kota Makassar. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Prof Yusran sebagai Pj Walikota yang menimbulkan kontroversi dan dianggap tidak mendukung kondisi pandemik. Misalnya, soal diijinkannya penyelenggaraan resepsi pernikahan dan shalat led berjamaah beberapa waktu lalu di tengah wabah Covid-19 yang masih merajalela. Juga diperbolehkannya seluruh tempat usaha buka, termasuk *mall*. Sejumlah pihak pun memprotes keras

kebijakan Pj Walikota yang baru seumur jagung menjabat ini. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar, misalnya, mengecam kebijakan Prof Yusran, yang terkesan mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Masa jabatan Prof Yusran yang sangat singkat ini tentu menimbulkan pertanyaan besar oleh masyarakat Makassar karena hanya menjabat selama empat puluh tiga (43) hari. Selain Penjabat atau Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran juga menjabat Kepala Bappeda Sulsel, ia juga dapat kepercayaan dari Nurdin Abdullah sebagai Ketua TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) Pemprov Sulsel. Jauh sebelum menjadi Pj, Prof Yusran dan Prof Nurdin memiliki hubungan yang sangat dekat. Hal ini tentu sangat menimbulkan pertanyaan di masyarakat luas. Pasalnya, proses pemberhentian Prof Yusran sebagai Pj hanya lewat pesan WhatsApp saja yang dikirim langsung oleh Prof Nurdin. Meskipun pemberhentian secara administrasi ada, namun sebagian masyarakat menganggap bahwa pemberhentian melalui pesan singkat dianggap tidak etis dilakukan oleh pejabat daerah. Hal ini juga tentunya mempengaruhi hubungan kedekatan yang terjalin antara Prof Yusran dan Prof Nurdin.

Berdasarkan segala pembahasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, yaitu: **“Dinamika Politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada judul ini ialah:

- 1.2.1. Bagaimana Proses Terpilihnya Prof Yusran Yusuf sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020?
- 1.2.2. Apa faktor penyebab Prof. Yusran Yusuf diganti sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menggambarkan dan Menganalisis Proses Terpilihnya Prof Yusran Yusuf Sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020
- b. Untuk Menggambarkan dan Menganalisis Faktor Penyebab Prof. Yusran Yusuf Diganti Menjadi Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Dalam hal ini membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis.

A. Manfaat Akademik

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat memahami bagaimana Dinamika Politik Pj Walikota Makassar Tahun 2020.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lain.
- c. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui Bagaimana Dinamika politik yang terjadi pada pengangkatan dan pergantian Prof. Yusran Yusuf sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan bagian bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori atau pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan untuk memudahkan mengkaji mengenai masalah dinamika politik Pejabat (Pj) Walikota Makassar.

2.1. Pendekatan New Institutionalisme

Institusionalisme Baru merupakan pendekatan yang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya. Perhatian utama dalam pendekatan ini adalah pada negara dan institusi-institusinya sebagai unsur utama yang menentukan dan membatasi. Pendekatan ini menolak pandangan yang melihat negara sebagai institusi yang tidak bebas; yang ditentukan oleh massa lewat aktor-aktor politik pilihan mereka.⁵

Bagi pendekatan Institusional Baru negara sebagai institusi merupakan aktor tersendiri yang berdiri sendiri dan tidak merepresentasikan kelas atau kelompok yang berada di dalam masyarakat. Pada intinya institusi politik dapat dipahami sebagai aturan permainan atau *rules of the game* yang dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti misalnya dari sifatnya yang formal (undang-undang, peraturan-peraturan) atau informal (kebiasaan, norma sosial, adat istiadat dan seterusnya), tertulis atau tidak tertulis. Dalam pengertian yang lebih sempit ia berarti tata tertib untuk mengatur perilaku sekelompok manusia dan

⁵ Budiardjo, Miriam. Soeseno, Nuri. Dan Rosa Evaquarta. *Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep*. Modul 1.

suatu proses pembuatan keputusan, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sebuah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang teratur oleh peraturan yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai institusi. Keberadaan institusi politik dalam masyarakat disebabkan karena adanya kesadaran warga bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama di antara mereka dan kehidupan bersama yang perlu diatur bersama. Hal ini mendorong mereka untuk mengorganisasi diri dan membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur kebersamaan dan kehidupan mereka. Lahirnya peraturan-peraturan di tengah masyarakat juga sebagai dasar atau tonggak bagaimana masyarakat bergerak untuk mencapai suatu kepentingan yang telah lahir di antara mereka.

Pemerintah atau badan-badan pemerintah seperti birokrasi, parlemen, presiden, dan seterusnya, merupakan salah satu bentuk institusi tersebut. Selain itu, juga organisasi-organisasi dalam masyarakat merupakan bentuk institusi politik seperti misalnya partai politik, organisasi akar rumput, masyarakat sipil, dan seterusnya. Dengan pendekatan ini maka ilmu politik kembali memfokuskan perhatian pada negara termasuk aspek legal institusionalnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan adanya institusi-institusi maka dapat dipastikan adanya aturan aturan atau pola pengaturan yang mengatur kehidupan bersama atau kepentingan kolektif yang ada dalam sebuah masyarakat. Hal ini tentu memberikan jaminan kepastian dan rasa aman bagi warga. Oleh karena

institusi mempunyai kekuasaan yang secara relatif otonom maka ia tidak dapat diubah dengan semuanya sendiri. Keberadaan institusi dengan demikian memungkinkan adanya stabilitas di dalam masyarakat. Institusi-institusi dengan demikian dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan kolektif, yang berupa peraturan atau norma perilaku dan peran, yang memberi keuntungan, peluang dan kekuatan pada serta memelihara individu atau kelompok. Mengingat kegunaannya ini maka menjadi sangat penting untuk membentuk institusi yang dapat menghimpun kepentingan sebanyak mungkin pilihan warga untuk menentukan kepentingan kolektif.

Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, di samping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris.⁶ Sebagai contoh, “institusionalisme lama” sistem presidensial secara signifikan berbeda dengan sistem parlementer berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “institusionalisme baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian, bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut? Apakah perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja pemerintah?⁷ Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, lebih jauh, juga merefleksikan bahwa pendekatan institusionalisme baru juga melihat

⁶ Ramadhan, Moh. Fajar Shodiq. dan Tri Hendra Wahyudi. 2016. *Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1. Universitas Brawijaya. Malang

⁷ Peters, B. G. (2011). *Institutional theory in political science: the new institutionalism*. Bloomsbury Publishing USA.

bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Hall dan Taylor membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (historical institutionalism), institusionalisme pilihan rasional (rational choice institutionalism) dan institusionalisme sosiologis (sociological institutionalism).⁸

2.2. Teori Kekuasaan

Semua politik adalah mengenai kekuasaan. Praktik politik sering digambarkan sebagai pengerahan kekuatan, dan menjadi subjek akademis studi mengenai kekuasaan.⁹ Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan menurut Sanderson sebagai kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain atau bahkan memadamkan usaha menentangnya. Di balik kekuasaan terkandung makna adanya ancaman paksaan atau kekuatan konstan jikalau ada perintah atau keputusan yang tidak dipatuhi secara sukarela. Kekuasaan didukung oleh kemampuan penggunaan kekerasan.¹⁰ Terdapat empat istilah yang berhubungan dengan kekuasaan yaitu kepatuhan, paksaan, otoritas dan pengaruh. Kepatuhan mengacu

⁸Hall, P. A., & Taylor, R. C. (1996). *Political science and the three new institutionalisms*. *Political studies*. Hal 9.

⁹ Heywood, Andrew (2015) *Pengantar Teori Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 178

¹⁰Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.

pada tindakan-tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri karena sumpah kepada orang lain.¹¹Pemaksaan, otoritas dan pengaruh adalah produk dari hubungan ketergantungan yang timpang.

Dalam dunia politik, kekuasaan dipandang sebagai salah satu konsep politik. Kekuasaan politik dijadikan sebagai kemampuan memberdayakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan diri sendiri, lembaga ataupun masyarakat. Kekuasaan dapat dipandang dari dua arah, masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Pertama, kekuasaan dapat dilihat sebagai alat penggerak konflik dalam dunia politik apabila politik dimaknai sebagai ruang pertarungan atau arena pertempuran. Duverger menyebut ini sebagai aspek antagonisme dari kekuasaan. Memegang posisi kekuasaan memberikan seseorang keuntungan yang sangat besar. Yang kedua adalah, kekuasaan dapat melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum dari tekanan dan tuntutan kelompok-kelompok kepentingan yang khusus apabila kita menganggap bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kekuasaan mencakup dua aspek yaitu: aspek kewenangan dan kemampuan. Oleh karena bila dihubungkan dengan konsep politik, maka kekuasaan politik melaksanakan 2 hal tadi yaitu mencakup kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan aktivitas politik. Berkaitan

¹¹ Martin, Roderick. 1993. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

dengan pengertian kekuasaan politik, maka secara jelas dapat memahami sifat-sifat kekuasaan politik, dengan melalui eksistensi pengorganisasian sistem politik dari suatu negara yang juga cara-cara penyelenggaraan kekuasaan politik yang ada di dalamnya. Sifat-sifat itu adalah keabsahan, pertanggungjawaban, dan keragamannya. Keabsahan (legitimasi) adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ditujukan kepada mereka itu adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu sesuai dengan azas dan prosedur yang telah menjadi tradisi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.¹²

Dasar-dasar kekuasaan atau sumber-sumber kekuasaan adalah faktor-faktor tempat berpijaknya kekuasaan. Salah satu dasar kekuasaan adalah kepercayaan seseorang terhadap kekuasaan sang actor. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan dapat berupa kedudukan. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu *authority* (otoritas) dan *Legitimate* (keabsahan). Seperti yang dikatakan Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society*, bahwa wewenang adalah kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan

¹² Budiardjo, Meriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. Hal 15

membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.¹³

Dalam kekuasaan pun ada yang disebut dengan relasi kuasa (*Power Relation*), yaitu hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berlandaskan ideologi tertentu. Setiap lembaga pemerintahan memiliki kekuasaan yang hubungannya dengan lembaga sejenis lainnya yang berada di atas atau di bawahnya, dengan juga hubungannya dengan lembaga lainnya pada tingkat yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk negara dan pemerintahan pada hakekatnya adalah perwujudan dari kekuasaan politik itu sendiri. Dalam penelitian ini juga kita bisa melihat bagaimana relasi kuasa yang terjadi dalam pengangkatan Penjabat (Pj) Walikota. Relasi yang dimaksud disini adalah bagaimana relasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian dengan pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur.

2.2.1. Dimensi- Dimensi Kekuasaan

Untuk memahami gejala politik kekuasaan secara tuntas maka kekuasaan dapat ditinjau dari empat dimensi kekuasaan, yang dinyatakan oleh Charles F Andrian yaitu :

- a. Potensial dan Aktual
- b. Konsensus dan Paksaan
- c. Jabatan dan Pribadi
- d. Positif dan Negatif ¹⁴

¹³ Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hal. 90

Dalam setiap situasi, hubungan kekuasaan politik mempunyai tiga unsur yang selalu terkait di dalamnya. Ketiga unsur itu meliputi: tujuan, cara penggunaan sumber-sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka dapat disebutkan sejumlah ciri yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan politik adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia
2. Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain
3. Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun pemerintah (Negara dalam hubungan luar negeri)
4. Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok organisasi, atau pemerintah (Negara)
5. Suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif
6. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, konsensus, atau kombinasi keduanya
7. Hal ini bergantung pada perspektif moral yang digunakan yakni tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk?

¹⁴Haryanto. *Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar* (Yogyakarta: PLOD, 2005), h. 25

8. Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga menguntungkan kelompok kecil masyarakat
9. Pada umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan atau dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat.
10. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik.¹⁵

2.3. Teori Kepemimpinan

Pada dasarnya kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya, mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikutnya.

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-

¹⁵Rohaniah dan Efriza. *Pengantar Ilmu Politik*, 202

lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Oleh karena itu, pemimpin politik juga berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Tidak seperti kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

Selain itu, kepemimpinan politik juga dapat dipahami dalam tiga perspektif: 1) kepemimpinan sebagai pola perilaku. 2) kepemimpinan sebagai kualitas personal. 3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan politik dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungan politik yang signifikan, mampu mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, mampu memotivasi anak buah dan konstituennya dengan baik, sehingga senantiasa optimis dan mampu bangkit dari keterpurukan. Di samping itu, ia juga dituntut untuk mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan segmen manapun, mampu memberi contoh dan mendorong

¹⁶ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1990), 134.

suatu proses pendidikan dan pencerahan politik, mampu menghadirkan proses sirkulasi elite di dalam organisasi secara sehat, dan mampu mendudukan orang-orangnya di posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga politik kenegaraan yang ada. Kepemimpinan politik juga harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial. Pergeseran kondisi yang terjadi dalam suatu masyarakat juga dapat mengukur bagaimana tingkat kepemimpinan yang dimiliki oleh aktor.

2.4. Dinamika Politik

Dinamika secara umum artinya “gerak” sehingga memahami apa itu dinamika politik adalah berarti berbicara mengenai pergerakan dalam dunia politik. Menurut Leo Agustoni (2009) mengungkapkan bahwa: “Dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis – teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya.:

Dengan adanya dinamika politik, pergeseran atau pergerakan yang terjadi dalam dunia politik akan nyata untuk dilihat.

Salah satu hal yang menarik baru saja terjadi di kota Makassar. Pergantian Penjabat walikota dilakukan pada tahun 2020. Makassar dipimpin oleh penjabat (Pj) yaitu Iqbal Suhaeb setelah pemilihan

walikota tahun 2018 dimenangkan oleh kotak kosong. Setelah satu tahun menjabat masa jabatan Iqbal Suhaeb berakhir pada Mei 2020 tepat pada masa pandemic memuncak di Indonesia khususnya di Makassar. Prof. Yusran Yusuf yang menjadi pengganti Pj walikota ini hanya menjabat 44 hari. Fenomena ini tentunya sangat menarik perhatian khalayak banyak. Mendagri mengeluarkan Sk Pj walikota juga melalui usulan gubernur. Itu berarti, orang yang diangkat menjadi Pj adalah orang yang integritasnya sudah teruji pada pemerintahan daerah. Namun fenomena masa jabatan yang seumur jagung ini tentu mempertanyakan bagaimana integritas dari Prof. Yusran. Bukan hanya Prof. Yusran, integritas Prof. Nurdin juga patut dipertanyakan karena sebagai gubernur, dialah yang mengusulkan Prof. Yusran untuk menjadi Pj walikota.

Dinamika politik ini mengundang fokus baik pengamat politik ataupun masyarakat untuk mengkaji dan mengamatinya. Tidak sedikit orang yang menghubungkan dengan politik kepentingan. Namun secara kelembagaan, sudah kewenangan pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan terhadap bagaimana kondisi di pemerintah daerah.

2.5. Telaah Pustaka

Penelitian yang berjudul “Dinamika Politik Pj Walikota Makassar Tahun 2020” tentunya membahas bagaimana pergantian Jabatan Pj walikota Makassar. Meskipun belum banyak penelitian yang serupa, namun penulis menggunakan dua literatur yang dianggap mampu

membantu terlaksananya penelitian ini. Meskipun menggunakan literatur, peneliti tetap memberikan posisi yang berbeda dalam penelitian ini agar terhindar dari kesamaan-kesamaan penelitian terlebih dahulu.

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akhsrullah dengan judul penelitian "Intervensi Pejabat Politik Dalam Mutasi Pejabat Struktural Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai pola dalam pelaksanaan mutasi pegawai di Setda Kabupaten Gowa. Terdiri dari pola negosiasi, pola ancaman dan pola pemaksaan. Proses terjadinya pemaksaan pegawai untuk memihak kepada kepentingan-kepentingan pejabat politik dimulai dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pejabat politik dan berbagai pejabat-pejabat lainnya. Kesimpulan dari penelitian adalah adanya Intervensi pejabat politik terhadap mutasi pejabat struktural. Mobilisasi pegawai negeri sipil untuk berpihak kepada kepentingan pejabat politik melalui arahan dan instruksi dari pejabat politik yang secara otomatis juga bertindak selaku pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena itu masih ada pegawai negeri sipil yang berafiliasi kepada kepentingan pejabat politik guna mengamankan kedudukannya dalam jabatan struktural. Pemihakan tersebut dikarenakan adanya kontrak politik yang sebelumnya telah disepakati bersama demi menunjang posisi jabatannya dalam birokrasi di tingkat daerah khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.

Kedua, penelitian yang berjudul "Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015" yang dilakukan oleh Yusriati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada serentak 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Adanya politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran pemerintahan daerah Bima. Hal tersebut merupakan bentuk imbalan bupati terhadap pejabat yang telah memilihnya pada pemilukada serentak 2015, yang tidak memilihnya akan digeser dari jabatannya.

Dari kedua penelitian diatas, diketahui bahwa adanya pemanfaatan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang dilakukan oleh elit politik yang berkuasa. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pergantian Pj walikota Makassar tahun 2020. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini berfokus pada satu pejabat saja yang menjabat hanya selama 43 hari. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui proses pengangkatan dan faktor penyebab digantikannya Prof. Yusran sebagai Pj walikota Makassar dengan melihat relasi kuasa yang terjadi.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan. Kekuasaan melahirkan keputusan atau kebijakan yang selalu dianggap sebagai instrumen dalam memainkan kekuasaan yang terdapat dalam relasi-relasi antara pihak yang berkuasa dan individu. Relasi yang tercipta adalah keinginan untuk saling menundukkan. Sering kali kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemangku kekuasaan akan menciptakan dinamika. Dinamika dalam dunia politik dimaknai sebagai pergerakan politis yang dilakukan lembaga dalam menjalankan tugas atau wewenang.

Kota Makassar adalah salah satu kota yang tidak bisa dipisahkan oleh dinamika-dinamika politik yang unik. Salah satu dinamika yang mencuri perhatian masyarakat luas adalah pergantian Pj Walikota yang menjabat selama 43 hari. Pergantian jabatan Pj walikota yang singkat ini dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur melalui Koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kekuasaan yang dipegang Prof Nurdin sebagai gubernur Sulawesi Selatan tentunya memberikan wewenang untuk mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah mengangkat atau mengganti Pj Walikota. Namun, kebijakan ini tentunya melahirkan asumsi bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Prof. Nurdin adalah kepentingan politis yang berkaitan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Meskipun alasan melakukan pergantian Pj

Walikota yang singkat ini adalah karena dianggap tidak mampu menekan jumlah pandemi covid 19, namun tentu saja dalam dunia politik kepentingan-kepentingan politis tidak dapat dipisahkan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses terpilihnya Prof. Yusran Yusuf sebagai Pj Walikota serta menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab Prof. Yusran Yusuf diganti menjadi Pj Walikota Makassar tahun 2020. Peneliti menggunakan pendekatan new institutionalism untuk melihat bagaimana peran lembaga dalam menghadapi situasi politis. Teori kekuasaan melihat bagaimana pemangku kebijakan menggunakan kekuasaannya untuk melahirkan kebijakan yang sering kali memunculkan dinamika politik. Segala kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan juga mencerminkan bagaimana sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh elit politik. Dengan menggunakan pendekatan new institutionalism tentu peneliti mengharapkan hasil penelitian yang tidak hanya melihat lembaga atau institusi yang berpengaruh didalamnya.

2.7. Skema Berfikir

